

Potensi Penggunaan Koneksi Internet Instansi Pemerintah Bersama Masyarakat di Kota Makassar

The Potential Use of the Internet Connection of Government Agencies with Citizen in Makassar

Nur Alam

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar
Jl. Prof. Abdurrahman Basalama II no 25 Makassar Telp. 0411-4660084

Dinner_ice@yahoo.com

Diterima: 10 Oktober 2014 || Revisi: 9 Desember 2014 || Disetujui: 10 Desember 2014

Abstrak – Saat ini hampir seluruh instansi pemerintah maupun swasta telah melakukan penyewaan koneksi internet untuk memenuhi kebutuhan informasi masing-masing tak terkecuali pemerintah kota Makassar. Dengan sistem pembayaran dan pemakaian internet bulanan membuat instansi pemerintah tetap mendapatkan koneksi internet diluar jam kantor atau hari libur. Hal ini menimbulkan kemubassiran mengingat pada waktu-waktu tersebut koneksi internet tidak termanfaatkan sementara kebutuhan masyarakat akan akses internet belum tercukupi dengan baik. Berdasarkan hal itu maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi *bandwidth* internet instansi, Sumber Daya Manusia (pengelola jaringan), kebiasaan manajemen jaringan, waktu dan tanggapan terhadap ide pemakaian internet bersama masyarakat diluar jam kantor dan hari libur. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi secara langsung di 12 instansi pemerintah kota Makassar. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan potensi-potensi tersebut. Potensi *bandwidth* internet instansi adalah sebesar 26,5 MBps, terdapat 5 instansi yang terbiasa melakukan manajemen dan *monitoring bandwidth* dan hanya 3 instansi terbiasa melakukan *filtering website*. Ketersediaan pengelola jaringan sudah 100% dengan 85% yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi, potensi waktu rata-rata 15-16 jam perhari dan 24 jam pada hari libur. Sepuluh dari dua belas instansi setuju apabila penggunaan internet bersama masyarakat diimplementasikan.

Kata Kunci: koneksi, internet, *bandwidth*, potensi, instansi pemerintah

Abstract - Nowadays, both government agency and private company has been leasing internet connection to fulfill their information needed include Makassar government. With monthly use and payment make government agencies still get an internet connection after work hours or days off although unused or unutilized that wasting because on other side, citizen internet connection needed is not yet enquiry well. Base on that fact, this research was conducted to find out the bandwidth potentials of internet, human resource (network administrator), network management habitual, used time and responses to the idea of internet usage with the community beyond the office hours and holidays. This research was conducted through interview and direct observation on 12 Makassar government agencies. The data was analyzed qualitatively to describe the potentials. Totals of potential internet bandwidth is 26,5 MBps, there are 5 agencies used to apply bandwidth management and monitoring and just 3 agencies which used to apply website filtering. Availability of network administrator is 100% with 85% educational background in information technology, the potential for an average time of 15-16 hours per day and 24 hours on holidays. Ten of the twelve agencies agree if the use of the internet with the community is implemented.

Keyword: connection, internet, *bandwidth*, potential, government agencies

PENDAHULUAN

Secara sederhana internet dapat diartikan sebagai kumpulan jutaan komputer dari berbagai belahan dunia yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dalam keterhubungan ini terdapat berbagai fungsi dan manfaat yang bisa diambil darinya. Salah satu fungsi dari internet adalah sebagai media transmisi dan distribusi informasi. Karena luas dan besarnya jaringan internet, maka segala macam

informasi yang dibutuhkan hampir semuanya dapat diperoleh dari internet. Menurut Efraim Turban, internet atau yang biasa disebut the net adalah jaringan yang menghubungkan sekitar satu juta komputer organisasional internasional di lebih dari 200 negara disemua benua termasuk Antartika. Contoh-contoh dari jaringan komputer organisasional internal mencakup *general electric* atau sistem informasi rumah sakit (Turban, 2006). Hal inilah yang membuat internet sangat berarti.

Setiap orang dengan berbagai profesi sangat membutuhkan internet, baik itu untuk memperoleh informasi, berbagi informasi ataupun untuk keperluan komunikasi lainnya. Menurut Lani Sidharta, walaupun secara fisik Internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umum Internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi Internet adalah informasi yang dapat dibayangkan sebagai suatu database atau perpustakaan multi media yang sangat besar dan lengkap. Bahkan Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olah raga, politik dan lain sebagainya (Sidharta, 1999). Defenisi internet menurut beberapa pakar dalam dunia teknologi informasi semuanya mengarah pada satu pokok defenisi yang dititik beratkan pada beberapa hal yaitu jumlah komputer yang sangat banyak, hubungan (komunikasi) antar komputer, letak dari komputer-komputer tersebut dari berbagai belahan dunia serta internet sebagai sumber informasi.

Kebutuhan akan internet bukan hanya menjadi kebutuhan perorangan, tetapi juga telah menjadi kebutuhan utama organisasi. Kebutuhan organisasi akan internet banyak dimanfaatkan dalam hal publikasi, transaksi atau pelayanan, administrasi, promosi dan berbagai kebutuhan lain tergantung dari jenis organisasinya. Instansi pemerintah merupakan salah satu organisasi yang sangat membutuhkan layanan internet untuk menunjang fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau dalam pengelolaan manajemen dan operasional harian organisasi tersebut. Salah satu peran penting internet terhadap instansi pemerintah adalah sebagai media dalam mengaplikasikan program *Electronic Government (E-Government)*. Program *E-Government* merupakan program pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada sesama instansi pemerintah (*Government to Government*), instansi pemerintah dengan pelaku bisnis (*Government to Business*) atau antara pemerintah dengan masyarakat (*Government to Citizen*). Menurut Lamuria Carter dan France Belanger, *E-Government* meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan pemerintah dan informasi kepada warga dengan beberapa manfaat diantaranya meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada warga, memberikan akses publik yang lebih besar untuk memperoleh informasi dan lebih efisien, serta penghematan biaya (Carter & Belanger, 2005)

Adanya program *e-Government* dan besarnya manfaat internet terhadap instansi pemerintah, maka hampir seluruh instansi pemerintah yang sudah terjangkau oleh layanan internet dari *Internet Service Provider (ISP)* melakukan penyewaan jasa internet tak terkecuali dengan instansi pemerintah yang berada dalam wilayah dan lingkup pemerintah kota Makassar.

Saat ini banyak sekali program pemerintah berkenaan dengan penggunaan internet. Salah satunya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) adalah penyediaan internet gratis untuk masyarakat melalui program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Program PLIK dan MPLIK ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia dengan memberikan akses internet demi terwujudnya masyarakat informasi Indonesia. Program ini lebih di khususkan pada daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan ISP atau daerah-daerah pedesaan.

Masyarakat perkotaan juga harusnya tidak lepas dari perhatian pemerintah berkenaan dengan kebutuhan mereka akan akses informasi. Jumlah masyarakat yang membutuhkan akses informasi melalui internet di daerah perkotaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah khususnya pemerintah kota mampu menyediakan akses internet kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Salah satu program pemerintah kota Makassar yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan membantu masyarakat untuk melek IT adalah program Makassar *Cyber City* (Tahir, 2013). Dengan program ini pemerintah kota Makassar mengharapkan bisa menjadikan seluruh area Makassar menjadi area cakupan sinyal internet sebagai salah satu bentuk perhatian dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan internet.

Kebutuhan masyarakat terhadap internet tidak terlepas dari manfaat yang dapat diperoleh dari internet tersebut. Internet dapat dijadikan sarana untuk pengembangan profesional. Dalam hal ini masyarakat (informan) dapat meningkatkan pengetahuan, berbagi informasi dan berpartisipasi dalam forum lokal maupun internasional. Informan dapat mengakses informasi seperti pendidikan, teknologi, ekonomi, olah raga, politik dan budaya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada berupa *World Wide Web (www)*,

File Transfer Protokol (FTP), e-mail maupun *mailing list* (Suprihatin, 2009).

Harga sewa jasa internet seolah berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan internet tersebut. Berkenaan dengan biaya internet, apabila dibandingkan dengan dua negara tetangga kita Singapura dan Malaysia, biaya internet Indonesia 9 kali lipat dibandingkan Singapura dan 2 kali lipat dibandingkan dengan Malaysia (Nugroho, 2014).

Harga sewa yang cukup mahal dan kecepatan yang relatif lambat membuat sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan dalam hal mengakses internet. Mahalnya sewa internet tak termasuk di kota Makassar membuat pengeluaran instansi sangat besar. Sementara itu, sebagian besar instansi belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan internet tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh empat jam dalam sehari, pemanfaatan internet tersebut hanya digunakan selama jam kerja saja yaitu sekitar delapan jam. Dari kondisi ini menunjukkan betapa banyak *bandwidth* dan waktu yang seharusnya bisa dioptimalkan dalam hal pemanfaatannya. Kemubassiran ini ditambah lagi dengan hanya dimanfaatkannya 5 atau 6 hari kerja internet tersebut sementara waktu sewa dalam seminggu tetap terhitung 7 hari. Dari perbandingan antara waktu sewa yang digunakan dan yang tidak digunakan yang begitu besar perbedaannya, atau dengan kata lain, bahwa banyaknya waktu sewa internet yang tidak termanfaatkan mendorong untuk mengetahui potensi *sharing* koneksi internet instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses internet khususnya diluar jam kerja dan hari libur. Hal ini sekaligus untuk mengetahui tanggapan para pengelola jaringan instansi pemerintah akan hal tersebut.

Penelitian mengenai konsep membangun internet gratis untuk masyarakat dengan memanfaatkan *bandwidth* tidur koperasi pernah dilakukan oleh Joko Triono dimana dalam penelitian tersebut digunakan *radio wireless* sebagai *router* untuk membagi koneksi ke masyarakat. Adapun metode yang dipakai adalah dengan menggunakan tehnik *cron* yaitu sebuah tehnik untuk menjalankan perintah pengaktifan dan penonaktifan *NIC (Network Interface Card)* yang disesuaikan dengan jadwal korporasi. Menurut Joko Triono, konsep penggunaan bersama koneksi internet ini diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dan pemerintah. Keuntungan bagi masyarakat diantaranya adalah kebutuhan internet murah bahkan gratis masyarakat akan terpenuhi,

keberadaan internet gratis pada jam diluar kantor dan hari libur akan menguntungkan bagi masyarakat khususnya mahasiswa dan pelajar, kontrol bagi pelajar dan mahasiswa (dalam hal ini anak) akan mudah bagi orang tua karena ada tempat publik yang bisa digunakan untuk berinternet serta biaya sarana komunikasi bisa dikurangi sehingga akan berdampak pada penghematan anggaran belanja keluarga. Bagi instansi, konsep ini dapat memberikan manfaat berupa keberadaannya akan sangat dirasakan oleh masyarakat secara positif yang dampaknya akan lebih mengamankan instansi tersebut. Dengan konsep ini juga, instansi dapat menyampaikan segala produksi kepada masyarakat dengan biaya minimal (Triono, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana potensi penggunaan koneksi internet instansi pemerintah bersama masyarakat sekitar diluar jam kerja dan bagaimana tanggapan para pengelola jaringan di masing-masing instansi terhadap hal tersebut? Potensi-potensi yang dimaksud adalah sumberdaya atau perangkat yang menjadi komponen utama dalam pengelolaan jaringan yang terdiri dari *bandwidth* koneksi internet, sumber daya manusia, manajemen jaringan, waktu dan tanggapan terhadap penggunaan internet instansi bersama masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjabarkan potensi penggunaan koneksi internet instansi pemerintah yang berada dibawah naungan pemerintah kota Makassar kepada masyarakat sekitar khususnya diluar jam kerja atau hari libur. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperoleh dan mengemukakan pendapat para pengelola jaringan di masing-masing instansi terhadap solusi pengoptimalan pemanfaatan koneksi internet pemerintah dengan cara menggunakan koneksi internet pemerintah bersama masyarakat sekitar.

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang potensi *sharing* koneksi internet instansi pemerintah kepada masyarakat sebagai masukan kepada instansi pemerintah mengenai solusi pemanfaatan *bandwidth* sewa internet tersebut secara optimal. Secara keilmuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu ataupun konsep baru mengenai potensi penggunaan koneksi internet instansi pemerintah bersama masyarakat sekitar.

METODOLOGI PENELITIAN

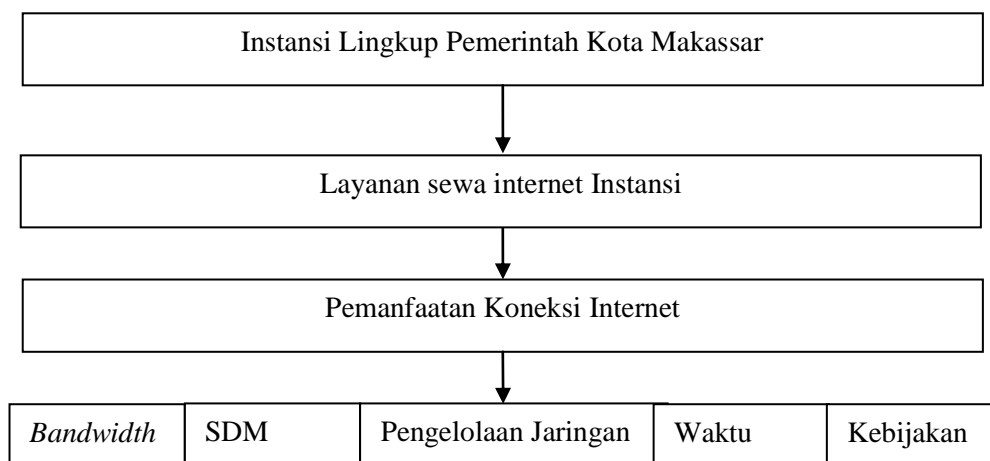
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan potensi-potensi internet instansi pemerintah di kota Makassar. Dalam penelitian ini jumlah informan tidak dibatasi dengan informan kunci dan informan utama. Informan Kunci yaitu kepala bidang yang membidangi pengelolaan jaringan pada setiap instansi pemerintah yang dijadikan lokasi penelitian. Informan Utama yaitu pengelola/Staf yang terlibat langsung dalam hal pengelolaan jaringan internet pada setiap instansi.

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian (*field research*) untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan pemanfaatan sewa internet instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara wawancara secara terstruktur dimana sebelumnya telah disiapkan pedoman untuk mengetahui potensi-potensi pemanfaatan koneksi internet pada instansi. Hasil wawancara dilengkapi dengan pengamatan langsung

(observasi), dengan melihat dan memperhatikan perangkat jaringan yang dipakai dan bertemu langsung dengan para pengelola jaringan di tiap instansi.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh, mempelajari data, menyusunnya dalam tabel, memeriksa keabsahan data serta menafsirkan dengan analisis untuk membuat kesimpulan penelitian.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di beberapa instansi pemerintah kota Makassar antara lain: Badan Pusat Statistik, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Informasi dan Komunikasi, Kantor DPRD, Kantor PDAM, Kantor Pelayanan Perizinan, Kantor PDE, Kantor Kecamatan Mariso, Kantor Kecamatan Makassar, Kantor Kecamatan Tamalate. Untuk menggambarkan alur dari penelitian ini maka didesain sebuah kerangka pikir penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disajikan dapat dilihat sebuah skema yang menggambarkan mengenai pemanfaatan insternet instansi pemerintah. Instansi-instansi yang dijadikan objek penelitian adalah beberapa SKPD di kota Makassar dengan mengambil perwakilan dari jenis SKPD yang ada yaitu BPS mewakili Badan, Dinas Kominfo dan beberapa dinas lain mewakili dinas-dinas, perwakilan kantor dan perusahaan daerah. Seluruh instansi pemerintah dalam lingkup pemerintah kota Makassar yang dijadikan lokasi penelitian telah melakukan penyewaan internet untuk memenuhi kebutuhan informasi instansi masing-masing. Untuk

menggambarkan potensi koneksi internet pada masing-masing instansi perlu dilakukan penelitian dan pencarian informasi mengenai besaran *bandwidth* sewa internet yang pakai, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperhatikan latar belakang pendidikan mereka, kebiasaan manajemen jaringan yang biasa dilakukan berupa manajemen dan *monitoring bandwidth* serta *filtering website*, lama waktu sewa yang tidak termanfaatkan, serta kebijakan atau pendapat pengelola jaringan berkaitan dengan penggunaan koneksi internet instansi bersama masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan atau dikategorikan menjadi empat kelompok/kategori kemudian disajikan dalam bentuk tabel, dinarasikan kemudian dianalisis. Adapun keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Potensi *Bandwidth* Internet

Tabel 1 menunjukkan jumlah keseluruhan *bandwidth* dari 12 instansi pemerintah di kota Makassar adalah 26,5 MBps. Dengan kata lain, ada sekitar 26,5 MBps *bandwidth* yang telah disewa oleh pemerintah namun belum dioptimalkan pemanfaatannya di luar jam kerja. Ketika kita hitung secara matematika dengan mengasumsikan kebutuhan

ideal setiap pengguna atas *bandwidth* koneksi internet adalah 10 KBps, maka dengan *bandwidth* sebesar itu mampu memenuhi kebutuhan internet sebanyak 339 orang pengguna khususnya di malam hari ($26,512 * 128/10 = 339$). Hal ini pula berarti bahwa pemerintah dapat membantu sekitar 339 pengguna internet dalam mengurangi biaya sewa internet masyarakat khususnya pada malam hari. Rata-rata *bandwidth* koneksi internet instansi masih sangat kecil yaitu 1 MB yang hanya mampu memenuhi kebutuhan internet masyarakat sebanyak 12 orang. Untuk melakukan pemakaian bersama masyarakat sekitar dibutuhkan peningkatan *bandwidth* internet sewa agar jumlah masyarakat yang dapat menggunakan internet tersebut lebih banyak.

Tabel 1 *Bandwidth* Instansi Pemerintah Kota Makassar

Nama Instansi	<i>Bandwidth</i>	Manajemen <i>Bandwidth</i> (Ya/Tidak)	<i>Monitoring Bandwidth</i> (Ya/Tidak)	<i>Filtering website</i>
BPS	1 MB	Tidak	Tidak	Tidak
Dishub Makassar	1 MB	Tidak	Tidak	Tidak
Disperindag	512 KBps	Tidak	Tidak	Tidak
Kantor Kecamatan Makassar	512 KBps	Ya	Tidak	Tidak
Kantor Pelayanan Perizinan Kota Makassar	1 MB	Tidak	Tidak	Tidak
Kantor Kecamatan Mariso	1 MB	Tidak	Ya	Tidak
Kantor Camat Tamalate	1 MB	Ya	Ya	Ya
Kantor PDAM Kota Makassar	1,2 MB	Ya	Ya	Ya
Kantor PDE Kota Makassar	15 MB	Ya	Ya	Ya
DPRD Kota Makassar	2 MB	Ya	Ya	Tidak
Dinas Kominfo kota Makassar	1 MB	Tidak	Tidak	Ya
Dinas Pendidikan Kota Makassar	256 Kbps	Tidak	Tidak	Tidak
Total <i>Bandwidth</i>	26,512 MBps			

Selain jumlah *bandwidth* dan banyaknya pengguna yang bisa memanfaatkan *bandwidth* tersebut diluar jam kerja, hal menarik lain yang dapat dianalisa dari Tabel 2 adalah dari 12 instansi tersebut terdapat 5 instansi yang telah terbiasa dan telah menerapkan manajemen *bandwidth* terhadap koneksi internet yang disewanya. Sementara 7 instansi lainnya belum melakukan manajemen *bandwidth* sementara manajemen *bandwidth* terhadap sebuah koneksi internet sangat diperlukan. Rachman Hakim mengatakan bahwa dengan tidak adanya manajemen *bandwidth* suatu jaringan contohnya di warnet, akan ada *client* yang tidak mendapatkan *bandwidth* disebabkan oleh komputer *client* lainnya

membutuhkan/menggunakan *bandwidth* lebih besar dan biasanya menggunakan *software* yang menguras semua *bandwidth* yang ada (Hakim, 2013). Seperti halnya manajemen *bandwidth*, *monitoring bandwidth* juga telah terbiasa dilakukan di beberapa instansi pemerintah di kota Makassar. Pentingnya *monitoring bandwidth* ini sesuai yang dikatakan oleh Breitbar Y bahwa *monitoring* yang efektif terhadap pemanfaatan jaringan dan indikator-indikator kinerja adalah sebuah kunci yang memungkinkan teknologi untuk proaktif terhadap manajemen sumber daya, akuntansi yang fleksibel, dan perencanaan cerdas dalam penentuan IP jaringan selanjutnya (Breitbar, 2001). Hampir semua instansi yang telah melakukan manajemen *bandwidth*

juga telah melakukan *monitoring* terhadap *bandwidth* yang disewanya secara rutin. Namun demikian, secara keseluruhan masih lebih banyak SKPD yang belum melakukan manajemen dan *monitoring bandwidth* secara rutin. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa potensi kebiasaan manajemen *bandwidth* pada instansi masih tergolong rendah terutama berkenaan dengan *filtering website*. Sementara menurut Andi Akifah, penyaringan internet memberikan perlindungan kepada pengguna internet dari tindakan yang tidak bertanggung jawab dan konten jahat (*malicious content*). Apalagi perlindungan anak-anak terhadap konten yang dilarang adalah tindakan yang sangat dibutuhkan untuk dilakukan sejak melimpahnya konten internet yang mampu mempengaruhi psikologis mereka (akifah, 2011). Yang kita bisa tarik adalah bahwa pada dasarnya selain mengandalkan *filtering website* dari ISP. Instansi pemerintah juga dapat ambil bagian dalam hal tersebut seperti dengan melakukan *filtering* terhadap jaringan internet yang masuk ke instansi tersebut. Andai kata koneksi internet yang dipakai bisa di sharing atau dipakai oleh masyarakat di sekitar instansi maka instansi tersebut telah membantu program pemerintah terhadap penggunaan internet yang sehat dan aman. Instansi tersebut telah ikut melindungi masyarakat dari dampak negatif website yang mengandung unsur pornografi, judi, *trafficking* atau *malware*.

Potensi Pengelola Jaringan

Salah satu faktor yang sangat menunjang dalam hal pengelolaan jaringan pada suatu instansi adalah ketersediaan sumber daya manusia. Kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh kesesuaian latar belakang pendidikan dengan penempatan atau tugas yang di berikan kepadanya. Hal ini sesuai dengan yang pernyataan bahwa karyawan yang ditugaskan atau ditempatkan sesuai dengan bidang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan minat, terlihat karyawan merasa lebih puas dan lebih senang dalam bekerja (Widiantara & Bagus, 2012). Sementara hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja dinyatakan oleh Ardana, dkk bahwa penempatan yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan dapat menimbulkan rasa tidak puas pada diri karyawan dan kurangnya kontribusi kerja karyawan terhadap perusahaan (Ardana, Mujiati, & Mudiarta, 2012).

Tabel 2 Pengelola Jaringan

Instansi	Jumlah Pengelola	Latar belakang Pendidikan
BPS	2	S1 Komputer
Dishub Makassar	3	D3 komputer S1 Ekonomi
Disperindag	1	S1 Teknik Komunikasi
Kantor Kecamatan Makassar	1	S1
Kantor Pelayanan Perizinan Kota Makassar	4	S1 Komputer S1 Ekonomi
Kantor Kecamatan Mariso	1	D3 Pariwisata
Kantor Camat Tamalate	2	S1 Komputer
Kantor PDAM Kota Makassar	2	S1 Komputer
Kantor PDE Kota Makassar	4	S1 Komputer, S1 Ekonomi, S1 Elektro, SMA TKJ
DPDR Kota Makassar	1	S1 Komputer
Dinas Kominfo Kota Makassar	3	S1 Komputer S1 Ekonomi
Dinas Pendidikan Kota Makassar	3	S1 Komputer S1 Pendidikan

Pengelola jaringan merupakan SDM yang sangat penting perannya dalam perusahaan sehingga penempatan dan pemilihan latar belakang pendidikannya yang sesuaipun menjadi sangat penting. Pengelola jaringan bertugas untuk mengatur kelancaran atau ketersediaan akses internet para pengguna jaringan di instansi masing-masing. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai yang menjadi pengelola jaringan internet di instansi yang dipilih kebanyakan sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya yaitu pendidikan yang erat kaitannya dengan teknologi informasi atau komputer.

Hanya terdapat 4 pegawai dari 12 instansi yang bertindak sebagai pengelola jaringan dengan latar belakang pendidikan yang tidak berkaitan dengan teknologi informasi dan 23 atau 85 persen sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Hal ini menandakan bahwa potensi pengelola jaringan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sangat besar. Namun dalam pengelolaan jaringan tersebut masih bersama-sama dengan pegawai yang latar belakang pendidikannya berkaitan dengan

teknologi informatika kecuali pada kantor Kecamatan Mariso yang pengelola jaringannya berlatar belakang pendidikan pariwisata.

Potensi Waktu Pemanfaatan

Potensi waktu pemanfaatan *bandwidth* sewa internet instansi pemerintah kota Makassar dimanfaatkan secara maksimal pada jam kantor antara pukul 07.30 sampai pukul 16.00 WITA (lihat Tabel 3). Hal ini berarti bahwa dari 24 jam sehari, waktu pemanfaatan *bandwidth* internet hanya berkisar antara 8 sampai 9 jam sementara 15 sampai 16 jam tidak dimanfaatkan yang menandakan bahwa potensi untuk membagi koneksi internet ini dengan masyarakat memungkinkan dilakukan selama 15 sampai 16 jam perhari dan bahkan 24 jam perhari untuk hari-hari libur.

Tabel 3 Waktu Pemanfaatan *Bandwidth* Instansi Pemerintah

Instansi	Waktu Pemanfaatan
BPS	7.30 - 16.00
Dishub Makassar	7.30 - 16.01
Disperindag	08.00-16.00
Kantor Kecamatan Makassar	08.30 - 16.00
Kantor Pelayanan Perizinan	08.00-16.00
Kantor Kecamatan Mariso	08.00-16.00
Kantor Camat Tamalate	08.00-16.01
Kantor PDAM Kota Makassar	07-30-14.00
Kantor PDE Kota Makassar	24 jam
DPRD Kota Makassar	24 Jam
Dinas Kominfo kota Makassar	08.00-16.00
Dinas Pendidikan Kota Makassar	07.30-15.30

Potensi Tanggapan tentang *Sharing* Koneksi Diluar Jam Kerja

Tabel 4 menunjukkan bahwa hampir seluruh pengelola jaringan internet pada masing-masing instansi pada dasarnya setuju dengan dilakukannya penggunaan bersama koneksi internet instansi pemerintah dengan masyarakat sekitar pada waktu-waktu diluar jam kerja sebagai salah satu solusi pengoptimalan koneksi internet instansi pemerintah meskipun beberapa diantaranya menambahkan beberapa catatan yang harus diperhatikan. Persetujuan pengelola jaringan terhadap solusi alternatif pengoptimalan koneksi internet ini merupakan sebuah dukungan yang menandakan potensi untuk pemakaian bersama internet tersebut sangatlah besar.

Tabel 4 Tanggapan Terhadap *Sharing* Koneksi Diluar Jam Kerja

Instansi	Tanggapan <i>sharing</i> Internet
BPS	Setuju, selama tidak mengganggu aktifitas pegawai
Dishub Makassar	Tidak perlu karena akan menghambat akses internet kantor
Disperindag	Setuju, asal dipergunakan untuk mencari informasi yang bermanfaat.
Kantor Kec. Makassar	Tidak ada tanggapan
Kantor Pelayanan Perizinan	Setuju, pimpinan juga sangat mendukung namun diperlukan <i>filtering</i> terhadap website tertentu
Kantor Kecamatan Mariso	Setuju,hal ini agar masyarakat juga dapat menikmati layanan internet secara gratis. Dari awal kami membuka akses internet utk masyarakat sekitar dan responnya cukup baik.
Kantor Camat Tamalate	Setuju, supaya internet ini bisa lebih bermanfaat
Kantor PDAM Kota Makassar	Setuju dengan catatan <i>bandwidth</i> yang dipakai dirasa sudah cukup
Kantor PDE Kota Makassar	Setuju, agar internet ini juga bisa lebih dirasakan nilai gunanya oleh masyarakat
DPRD Kota Makassar	Setuju sekali karena pasti internet ini akan lebih bermanfaat jika di manfaatkan oleh masyarakat
Dinas Kominfo kota Makassar	Setuju, hal ini pasti akan sangat bermanfaat untuk masyarakat
Dinas Pendidikan	Setuju, namun dalam penerapannya dibutuhkan pengawasan

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan menghasilkan gambaran mengenai potensi penggunaan koneksi internet instansi pemerintah bersama masyarakat sekitar di kota Makassar yang terdiri dari besaran *bandwidth* yang terdiri dari 26,512 MB yang menandakan bahwa potensi *bandwidth* yang dimiliki mampu memberikan koneksi internet secara gratis kepada masyarakat sekitar 339 orang secara bersamaan. Potensi pengelolaan jaringan yang mencakup manajemen *bandwidth* dan *monitoring bandwidth*, potensinya masih membutuhkan pengembangan karena sebagian besar instansi tersebut belum terbiasa melakukan manajemen dan *monitoring* koneksi internet mereka. Potensi SDM berupa pengelola jaringan sudah cukup bagus dengan latar belakang pendidikan yang hampir seluruhnya relevan dengan teknologi informasi. Potensi waktu yang bisa dimanfaatkan untuk dibagi

dengan masyarakat sekitar cukup banyak berkisar antara 15 sampai 16 jam sehari dan 24 jam pada hari libur. Potensi persetujuan dan dukungan untuk pengimplementasian terhadap solusi pengoptimalan koneksi internet dengan pemakaian bersama masyarakat juga cukup bagus mengingat hampir seluruhnya setuju untuk dilakukannya hal tersebut.

Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal tersebut diantaranya agar ide terhadap pemakaian bersama koneksi internet bersama masyarakat dapat diimplementasikan mengingat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan potensi untuk melakukan itu cukup memungkinkan. Selain itu, hal ini juga bisa dijadikan alternatif atau pendukung program pemerintah kota Makassar yang berencana untuk memberikan akses internet kepada seluruh masyarakat kota makassar melalui program Makassar *Cyber City*. Hal-hal yang masih perlu dilakukan pembenahan adalah terhadap peningkatan kebiasaan dan kemampuan manajemen jaringan oleh para pengelola jaringan di masing-masing instansi. Untuk pengimplementasian konsep ini masih diperlukan beberapa informasi dan penambahan komponen terutama yang berkaitan dengan perangkat keras dan aplikasi jaringan yang dibutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak terutama SKPD dibawah naungan pemerintah kota Makassar yang telah memberikan informasi untuk kesempurnaan dan kelengkapan hasil penelitian ini. Kepada BBPPKI Makassar yang telah membiayai penelitian ini. Tak lupa pula kepada seluruh rekan-rekan peneliti dan staf BBPPKI Makassar yang telah membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akifah, A. (2011). Internet Filtering: Solution For Countering Negative Content On The Internet? *ACADEMIA Fisip Untad* , 625-633.
- Ardana, Mujiati, N. K., & Mudiarta, W. I. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Belson, D. (2013, Juli 01). *The State of The Internet*. Retrieved April 02, 2014, from www. Akamai.Com: http://www.akamai.com/dl/akamai/akamai-soti-q313.pdf?WT.mc_id=soti_Q313
- Breitbar, Y. (2001). Efficiently Monitoring Bandwidth and Latency in IP Networks. *INFOCOM 2001. Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies* (pp. 933 - 942 vol.2). Anchorage, AK: IEEE.
- Carter, I., & Belanger, F. (Januari). The Utilization of e-Government Services: Citizen Trust, Innovation and Acceptance Factors. *Information System Journal*, 5-25.
- Hakim, R. (2013). *Manajemen Bandwidth dengan Mikrotik di Warnet Corner*. 2013: Universitas Gunadarma.
- Nugroho, w. (2014, Jan 13). *Mahalnya Harga Internet di Indonesia*. Retrieved Apr 02, 2014, from Ilmu Komputer.com: <http://www.infokomputer.com/2014/01/berita/mahalnya-harga-internet-di-indonesia/>
- Sidharta, L. (1999). *Internet Informasi Bebas Hambatan*. Elexmedia.
- Suprihatin. (2009). *Studi tentang Pemanfaatan Internet Pada Pengguna Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Tahir, M. (2013, November 21). *Peluang dan Tantangan Kominfo Makassar*. Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Turban, E. (2006). *Introduction to Information Technology*. Salemba.
- Triono, J. (2011). Konsep Membangun Internet Gratis Untuk Masyarakat Dengan Memanfaatkan *Bandwidth* Tidrur Korporasi. *Jurnal Teknologi* , 167-173.
- Widiantara, & G, B. I. (2012). Pengaruh Penempatan Karyawan, Kompensasi dan Kesempatan Berprestasi terhadap Semangat Kerja Karyawan di Yayasan Triatma Surya Jaya Bandung. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi STIE Triatma Mulya*, 59-69